

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bhaktitama, Brammy Pramudya, 2014, *Perkembangan Pengaturan Putusan Serta Merta Dari Pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Emirzon, Joni, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama.
- H, Sophar Maru, 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrasi Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Wignjosumarto, Parwoto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Wijaya, Gunawan, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri hukum bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Makalah

Dewi, Ni Putu Agustini Ari dan A.A. Ngr Yusadarmadi, 2013, *Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Riki, 2014, *Himpunan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Suwardi, 2012, *Penggunaan Lembaga Putusan Serta Merta*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Artikel dalam Jurnal

Wijayanta, Tata, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Mei.

Wijayanta, Tata, 2014, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004," *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 26, Nomor 1, Februari.

D. Internet

Hariani, Fitri N, "Enam Kesalahan Undang-Undang Kepailitan", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan>, Hukum Online, diakses 27 Juni 2016

Heriani, Fitri N., "Kurator Bersuara tentang Aturan Baru Imbalan Jasa", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c8e4a71870b/kurator-bersuara-tentang-aturan-baru-imbalan-jasa>, Hukum Online, diakses 7 September 2016

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a5b1617f4f2249ff5ca72c19a6d4e96>
d diakses 7 September 2016

<http://www.hukumkepailitan.com/2012/01/10/permohonan-pernyataan-pailit-oleh-debitur-dan-kreditor/> diakses pada 5 September 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/maksud>, diakses 7 September 2016.

Mahkamah Agung, “Keadaan Perkara Tahun 2014”,
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/keadaan-perkara-ma/keadaan-perkara-ma-th-2014>, diakses 1 Juni 2016.

Supriadi, Yedi, “Mitra Cipaganti Minta Persidangan Dipercepat”,
<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/04/16/323791/mitra-cipaganti-minta-persidangan-dipercepat>, diakses 1 Juni 2016.

Yasin, Muhammad, “Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)“,
[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)) diakses 7 September 2016.